

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

Oleh:

Aqeel Nebras¹

Bahri²

Universitas Negeri Makassar

Alamat: JL. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90222).

Korespondensi Penulis: aqeelnebras@gmail.com, bahri@unm.ac.id.

Abstract. *The politics of education has always been an interesting topic to discuss. The reason is that the relationship between education and politics is very close, even always related so that with this situation we can know that state politics plays a role in determining the direction of educational development in a country. As when there was a change of power to the New Order government, the political policies formulated in the GBHN also influenced national education policy. This can be seen in the curriculum as a set of educational plans that must adjust to these political policies. As a result, there were four changes to the national education curriculum in 1968, 1975, 1984 and 1994 during the New Order period. However, what is interesting is the fact that in every change in the national curriculum, history subjects have always been emphasized because of their function in shaping nationalism and national personality. One of them that received reactions and polemics was the subject of History of National Struggle Education (PSPB). This research aims to get a clear view of the existence of a closed ideological hegemony construction hidden in the history subject curriculum. In addition, this research is important to expose the practices of politicization of education so that education can never be separated from the interests of the ruler. It is hoped that this research can provide a relevant overview of the history subject curriculum during the New Order period and its relationship with aspects of Indonesian politics.*

Keywords: Curriculum, History, New Order.

Received March 18, 2025; Revised March 30, 2025; April 03, 2025

*Corresponding author: aqeelnebras@gmail.com

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

Abstrak. Politik pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, keterkaitan antara pendidikan dan politik adalah sangat erat, bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Seperti pada saat terjadi perubahan kekuasaan ke masa pemerintahan Orde Baru, maka kebijakan politik yang dirumuskan dalam GBHN juga mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini terlihat pada kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan harus menyesuaikan dengan kebijakan politik tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan kurikulum pendidikan nasional sampai empat kali tahun 1968, 1975, 1984 dan 1994 pada masa Orde Baru. Namun yang menarik adalah, kenyataan disetiap perubahan kurikulum nasional, mata pelajaran sejarah selalu menjadi mata pelajaran yang ditekankan karena fungsinya dalam membentuk nasionalisme dan kepribadian bangsa. Salah satunya yang mendapat reaksi dan polemik adalah mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang adanya kontruksi hegemoni ideologi tertutup yang disembunyikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah. Selain itu, penelitian ini penting untuk membongkar praktik-praktek politisasi pendidikan sehingga pendidikan tidak pernah lepas dari kepentingan penguasa. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang relevan kaitannya dengan kurikulum mata pelajaran sejarah masa Orde Baru dan keterkaitannya dengan aspek politik Indonesia.

Kata Kunci: Kurikulum, Sejarah, Orde Baru.

LATAR BELAKANG

Kurikulum Pendidikan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan situasi dan kondisi negara tersebut dan khususnya Pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena memang Kurikulum bersifat dinamis bukan statis. Sehingga wajar bila Kurikulum Pendidikan selalu mengalami perubahan, bahkan setiap pergantian menteri selalu berubah. Karena mereka mempunyai terobosan-terobosan tersendiri dalam menangani pendidikan yang ada di Indonesia. Namun tidak semuanya berhasil terkadang malah tidak bisa diterapkan di dunia Pendidikan. Sehingga perubahan Kurikulum pun terjadi. Pendidikan merupakan proses transfer of knowledge, namun saat ini tugas seorang pendidik tidak hanya semata menstranfer ilmu kepada siswa. Karena

anak sekarang tentu sangat berbeda dengan anak zaman old, mereka lebih paham dan pintar dengan Tekhnologi digital. Sehingga, pelajaran yang disampaikan guru bisa mereka cari dan didapatkan melalui internet. Maka tugas guru selain menstranfer ilmu adalah menanamkan karakter pada siswa. Dan itu yang dibutuhkan ana zaman sekarang. Sehingga perubahan Kurikulum mengalami perubahan-perubahan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Maka muncullah Kurikulum-kurikulum baru yang nantinya dapat menjadi solusi keberhasilan Pendidikan di Indonesia. Yang terbaru Kurikulum kita adalah Kurikulum Merdeka atau merdeka belajar, bukan lagi nilai ujian yang menentukan kelulusan siswa, namun diharapkan siswa mampu memenuhi kriteria ketuntasan belajar sesuai bakat dan minat siswa,

Pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter peserta didik, terutama pada jenjang Sekolah Menengah. Kurikulum pendidikan sejarah di sekolah menengah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perjalanan sejarah bangsa, serta perkembangan peradaban dunia. Dengan memahami sejarah, siswa tidak hanya diajak untuk menghafal tanggal dan peristiwa penting, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis, memahami latar belakang sosial, politik, dan ekonomi di balik setiap peristiwa, serta mampu menarik pelajaran dari sejarah untuk kehidupan masa kini dan masa depan.(Amalia et al., 2024)

Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia merupakan rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran yang akan menentukan proses dan hasil sebuah pendidikan yang dilakukan. Pada zaman belanda, pelaksanaan kurikulum pendidikan dan persekolahan diwarnai dengan misi penjajahan. Begitu juga dengan kurikulum pada zaman jepang, tujuan pendidikan pada zaman ini yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, pendidikan di tanah air terus berkembang.

Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar agar orang dapat berpikir secara arif dan lebih bijaksana (Azis,2019). Oleh sebab itu Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Ramadhan et al., 2020) termasuk didalamnya pula halnya dengan pendidikan sejarah. Sebagai sarana pendidikan,pengajaran Sejarah termasuk pengajaran normatif, karena tujuan dan sasarnya lebih ditujukan pada segi-segi normative yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan Pendidikan itu

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

sendiri. Oleh karena itu Tidak dapat dipungkiri bahwa Pendidikan Sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia, kebudayaan masyarakat Indonesia umumnya (Mustari & Rahman,2014). Pernyataan tersebut tidaklah terlalu berlebihan, namun sampai dengan saat ini masih terus dipertanyakan. Oleh karena itu banyak dimasa sekarang masyarakat melupakan pentingnya sejarah yang telah mereka perjuangkan dari zaman kuno yang dimulai sebelum masehi dan sesudah masehi(Wandini et al., 2021).Sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai nilai masyarakat dan kebudayaan.Definisi yang lain yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota Masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya(Djohar & Istiningsih, 2017)

Beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena pembelajaran Sejarah yang terjadi di Indonesia. Hamid Hasan misalnya, menjelaskan bahwa kenyataan yang ada sekarang, model pengajaran Sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak-anak melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan(Wahyuningsih et al., 2020). Mulai dari jenjang SD hingga SLTA, Pendidikan Sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta Sejarah sebagaimana teriutama. Tidak aneh bila Pendidikan disini terasa kering, tidak menarik, dan tidak memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah(Arta, 2012)

Pemerintah Orde Baru rupanya menyadari bahwa mata pelajaran sejarah merupakan wahana yang tepat dalam melaksanakan kebijakan politiknya, mengingat peran mata pelajaran sejarah dalam membentuk moralitas, nasionalisme dan kepribadian bangsa agar peserta didik menjadi manusia yang berwatak dan berbudi luhur. Sebagaimana realitas pada tahun 1983, ketika tuntutan dokumen politik menghendaki adanya nilai-nilai kebangsaan maka terjadilah perubahan kurikulum 1984 yang turut pula menghadirkan mata pelajaran sejarah baru yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) disamping sudah ada mata pelajaran Sejarah Nasional yang fokus pembahasannya tidak jauh berbeda dengan PSPB. Dari kenyataan tersebut, tidak salah jika kita mencurigai adanya praktik-praktek politisasi pendidikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah, khususnya dengan hadirnya mata pelajaran PSPB, yang memang

disusun untuk membentuk generasi muda sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kebijakan politik saat itu. Dalam kondisi ini, pendidikan telah menjadi tempat dalam melakukan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni, yaitu penguasaan tanpa paksaan untuk dapat membuat kelompok lain menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma dari pemerintah yang bekuasa demi tujuan legitimasi melalui jalan pendidikan, khususnya kurikulum mata pelajaran sejarah. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih dalam tentang kurikulum nasional mata pelajaran sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1968-1998. Selain itu, penelitian ini menarik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang adanya kontruksi hegemoni ideologi tertutup yang disembunyikan dalam kurikulum mata pelajaran sejarah (hidden curriculum) untuk menyeragamkan pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda agar sesuai dengan pandangan dan kepentingan pemerintah Orde Baru. (Sugiono, M. 1999).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode sejarah. Metode sejarah dapat dikatakan suatu proses mengkaji, menganalisa dan membaca secara kritis redaksional buku teks dan mengaitkan dengan kondisi masyarakat pada tahun berlangsungnya kurikulum. Penggunaan metode historis dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi (4) Historiografi. Sedangkan untuk pengumpulan data dalam artikel ini peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian sebagai jalan untuk pemecahan masalah, dengan memanfaatkan literatur-literatur, maupun buku-buku dan dokumen lainnya sebagai sumber infomasi dari persoalan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum

Secara etimologi Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu cureryang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu(Huda Rohmadi 2012). Dalam Bahasa latin curriculum berarti a running, course, or race coursesedangkandalam Bahasa Prancis yaitu

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

courir yang memiliki arti berlari. Dari beberapa pengertian bahasa latin tersebut kemudian digunakan istilah “courses” yang bermakna mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Sedangkan secara terminologi Kurikulum adalah sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, kurikulum dulu dipandang sebagai kumpulan dari mata pelajaran kemudian berubah makna menjadi kumpulan semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang berada dalam tanggung jawab sekolah, secara khusus yaitu hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan Pendidikan. Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum bukan hanya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, namun lebih dari itu diharapkan dengan adanya Kurikulum mampu merubah dan mengembangkan karakter kepribadian Peserta Didik sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan dan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan (Nurmadinah 2018).

Kurikulum Masa Orde Baru

Ketika Orde Baru bermaksud menata Kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tujuan Pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung maksud tersebut. Tentu saja kurikulum sekolahan dikembangkan sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional (Isma et al., 2022). Kurikulum 1968 yang berlaku pada awal masa Orde baru kemudian mengalami pergantian menjadi kurikulum 1975, kurikulum Sejarah juga mengalami penyempurnaan. Demikian seterusnya terjadi beberapa kali perubahan kurikulum menjadi kurikulum 1984, 1994 dan 2004 (yang akhir-akhir ini sempat diperbincangkan) (Alfian, 2011). Selain masalah kurikulum yang selalu mengalami perubahan, masalah yang tak kalah pentingnya adalah masalah buku ajar atau buku teks. Leirissa dalam Alfian (2011) menjelaskan bahwa masalah buku ajar ini sudah ada sejak sistem Pendidikan nasional mulai diterapkan di Indonesia tahun 1946. Saat itu buku ajar yang dipakai sebagai bahan ajar Sejarah adalah

karangan Sanusi Paneyang berjudul Sejarah Indonesia (4jilid) yang ditulis atas permintaan pihak Jepang pada tahun 1943-1944 yang kemudian dicetak ulang pada tahun 1946 dan 1950. Suatu hal yang menarik adalah, dalam buku tersebut tidak ada bagian mengenai Sejarah Pergerakan Nasional. Bagian ini kemudian baru ditambahkan pada terbitan tahun 1950. Pada tahun 1957 Anwar Sanusi menulis buku Sejarah Indonesia Untuk Sekolah Menengah (3jilid). Setelah itu kemudian muncul berbagai buku ajar lainnya yang ditulis oleh berbagai pihak, terutama oleh para guru, salah satunya buku yang dikarang oleh Subantardjo. Pada tahun 1970, para ahli Sejarah yang terhimpun dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) mengadakan "Seminar Sejarah II" di Yogyakarta. Dalam seminar yang dihadiri oleh para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu telah menghasilkan suatu keputusan untuk menulis buku sejarah, untuk keperluan perguruan tinggi dan bisa dijadikan sumber untuk buku ajar di SMP dan SMA. Setelah restu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka dibentuklah "Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Indonesia" dengan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo sebagai ketua (Suryadi, 2022).

Buku yang terdiri dari 6 jilid itu, kemudian juga tak luput dari permasalahan dan sempat memunculkan pertentangan. Menurut Prof. Leirissa (2006) sebab utamanya adalah masalah metodologis. Tidak semua penulis menggunakan metodologi yang sama yang telah ditentukan editorumum, Prof. Sartono Kartodirdjo (pendekatan structural) masing-masing penulis membawa tradisi ilmiah yang telah melekat pada dirinya (structuralataunaratif/kisah). Pada masa itu perbedaan antara pendekatan structural dan pendekatan naratif secara metodologis tidak bisa dijembatani sama sekali. Masing-masing memiliki domain atau kavelingnya sendiri-sendiri. Konflik yang berkepanjangan ini men menyebabkan Prof. Sartono mengundurkan diri (kemudiandi ikuti oleh penulis-penulis lainnya, termasuk dari LIPI). Setelah buku tersebut dicetak ulang (1983 -1984) sebagai editor umum hanya tercantum nama Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dan Prof. Dr. Marwati Djoened Poesponegoro (Suryadi, 2022). Setelah Prof. Nugroho meninggal dunia tahun 1985, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Prof. Dr. Fuad Hasan mengambil Keputusan untuk tidak lagi menggunakan buku Sejarah Nasional Indonesia yang enam jilid itu dan tidak mencetak ulang buku tersebut. Sebagai gantinya, setiap ahli sejarah, termasuk guru sejarah dibolehkan menulis buku Sejarah untuk digunakan di SMP dan SMA. Para ahli Sejarah diminta pengertiannya untuk tidak lagi meneruskan konflik

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

mengenai buku "standar' yang ada. Dengan demikian, perbedaan paham yang muncul sejak tahun 1970-anter sebut sudah mereda sampai sekarang (Irshanto, 2021).

1. Kurikulum 1968

Pada awal munculnya kurikulum 1968 sifat politis sangat erat melekat,yangmengganti kurikulum 1964 karenadicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan “Orde Lama”. Jika dilihat tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama lebih di tekankan pada kurikulum 1968 ini.Terjadi sebuah perubahan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa pancasila pada Kurikulum 1968. UUD 1945 menjadi pedomandalam penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuensi. Jumlah matapelajaran pada kurikulum 1968 berjumlah sembilan mata pelajaran. Pelajaran diKurikulum ini bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu orde baru. Correlated subject curriculum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968, artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Dalam Kurikulum 1968 ini identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak terkait dengan ketentuan obyektif dilapangan atau kehidupan nyata (tematik). Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada Kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an.

2. Kurikulum 1975

Munculnya Kurikulum 1975 dilatarbelakangi oleh pembangunan nasional karena akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkanpembaharuan tersebut. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankansaja. (Nurhalim, M. 2011) Kurikulum 1975 mempunyai prinsip yakni tujuan pendidikan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Namun Kurikulum 1975 ini mendapat banyak kritik dilapangan, karena guru hanya disibukkan dengan menulis perincian dari apa yang akan dicapai dari setiap pembelajaran. (Alhamuddin. 2019).

3. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan)

Kurikulum 1984 merupakan sebuah penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Subjek dalam pembelajarannya adalah siswa. Model seperti ini dinamakan aktif learning karena siswa yang selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun banyak sekolah yang tidak dapat menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas 14.

4. Kurikulum 1994 (Separate Subject Curriculum)

Kurikulum 1994 merupakan perpaduan antara Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 1994 ini mengalami sebuah perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Dalam Kurikulum 1994 ini antara tujuan dan proses pembelajaran kurang berhasil untuk dipadukan. Muatan nasional dan muatan lokalsangat banyak porsinya. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Tak hayal berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum ini. Dan akhirnya, Kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus (Irmadan 2019)

Oleh karena Kurikulum 1968 merupakan kurikulum pertama pada masa Orde Baru, maka kurikulum inilah yang menjadi sasaran pemerintah dalam membentuk citra baik dan menyatukan rakyat di bawah kepemimpinannya. Terbukti jika kita menganalisis landasan kurikulum 1968, yaitu TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menghendaki pembentukan manusia yang Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

isi Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat pembentukan “manusia Pancasilais sejati” ini bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan politik yang harus disebarluaskan dalam pendidikan berdasarkan kurikulum 1968. Oleh karena itu, digunakanlah mata pelajaran sejarah yang saat itu masih terintegrasi dalam Kewargaan negara dalam kurikulum 1968 menjadi salah satu wahananya. Mengapa sejarah menjadi salah satu mata pelajaran yang melaksanakan misi tersebut? Tentunya pemerintah melihat pentingnya mata pelajaran ini dalam membentuk pemikiran siswa tentang tragedi nasional Gerakan 30 September 1965 yang merupakan ancaman terhadap Dasar Negara Pancasila, dan menjadi tema sentral pada saat itu untuk menunjukkan peran pemerintah Orde Baru dalam keberhasilannya menumpas dengan gemilang gerakan tersebut di mata sejarah Indonesia.

Disini jelas tujuan Orde Baru dalam mata pelajaran sejarah, yaitu menanamkan pandangan atas peristiwa sejarah nasional G30S dilakukan oleh PKI dan juga meyakinkan peserta didik bahwa ada hubungan antara dirinya dengan Pancasila, yaitu sebagai penyelamat dan pelindung Pancasila. Selain itu, mengingat kondisi politik pendidikan di awal pemerintahan Orde Baru masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pemerintah sebelumnya. Dimana isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol/USDEK. Politik pendidikan nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia dan sebab itu strategi dasar pelaksanaan pendidikan nasional demokratis harus melahirkan patriot yang berdasarkan Pancasila Manipol/USDEK.³ Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Orde Baru untuk menghapus pemikiran tersebut secepat mungkin. Melalui pendidikan sejarah dalam mata pelajaran Kewargaan negara, maka mental masyarakat khususnya generasi muda yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol USDEK Soekarno, akan dapat diubah dengan mental Pancasila murni dan konsekuensi yang identik dengan Soeharto.

Jadi hegemoni awal pemerintah Orde Baru melalui mata pelajaran sejarah pada kurikulum 1968 masih dalam taraf pembentukan watak dan pemikiran generasi muda dengan jalan mengidentifikasi dirinya dengan Pancasila, serta untuk memutus pengaruh PKI dan Soekarno dengan tuduhan pengkhianat dan penyimpangan Pancasila. Begitulah tujuan pemerintah Orde Baru yang sebenarnya dalam kurikulum 1968, yaitu memiliki tujuan tersembunyi (hidden curriculum). Dengan begitu juga dapat diketahui bahwa mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1968 adalah sebagai salah satu alat hegemoni

pemerintah Orde Baru yang pertama dalam pendidikan. Hal ini terutama untuk membentuk watak dan menyeragamkan pola pikir generasi muda agar sejalan dengan pandangan pemerintah yang baru berjalan saat itu.

Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1975 berstatus terintegrasi dalam IPS dan termasuk dalam mata pelajaran yang menanamkan pendidikan Pancasila. Namun jika mencermati isi kurikulum IPS khususnya pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMP dan SMA, maka kurikulum mata pelajaran sejarah pada masa ini bukan hanya sekedar untuk menanamkan ideologi Negara, melainkan juga untuk pewarisan nilai-nilai 1945 dan sebagai alat untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah Orde Baru kepada peserta didik.(Safitri & Purwaningsih, 2016)

Semangat 1945 salah satunya dilakukan melalui mata pelajaran sejarah yang dimana pada kurikulum 1968 masih berstatus terintegrasi dengan Kewargaan Negara, dan pada kurikulum 1975 terintegrasi dalam IPS. Penanamannya pun masih dilakukan secara tersembunyi (hidden curriculum) melalui beberapa materi yang ada dalam mata pelajaran sejarah tersebut. Namun pada kurikulum 1984, terdapat penambahan konten mata pelajaran sejarah, yaitu PSPB, padahal sudah ada mata pelajaran yang fokus pembahasannya tidak jauh berbeda yaitu Sejarah Dunia dan Nasional. Tujuan mata pelajaran PSPB pun jelas-jelas dalam rangka pendidikan Pancasila dan penanaman nilai-nilai 1945 yang semakin menunjukkan suatu proses perkembangan hegemoni.

Pada kurikulum 1994, mata pelajaran PSPB dihilangkan dan diintergrasikan ke dalam PPKN. Suatu hal yang menarik, bahwa ketika materi dalam PSPB yang sangat menguntungkan pemerintah karena segala pandangan, ideologi dan kebijakan politik disalurkan dalam mata pelajaran PSPB tersebut kepada siswa, lalu mengapa ada perubahan dengan penghilangan mata pelajaran tersebut dalam kurikulum 1994?

Hal ini kiranya dapat kita jawab dengan meletusnya polemik mengenai mata pelajaran PSPB pada tahun 1985, tak lama setelah meninggalnya Nugroho. Pada tanggal 9 September 1985, Lembaga Penelitian Sejarah Nasional di Universitas 17 Agustus menyelenggarakan seminar membahas masalah ini. Kepala lembaga, Dr. Soeroto mengusulkan agar GBHN mengenai PSPB diubah supaya kekacauan yang terjadi dalam pelajaran sejarah di sekolah tidak menjadi parah. Dia juga mengusulkan agar tanggal mulainya sejarah perjuangan bangsa dijatuhkan pada saat datangnya orang asing ke Indonesia.

KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari masa ke masa kurikulum di Indonesia sering berganti dan berkembang dari Awal Kemerdekaan atau Masa Orde Lama (kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964), Kurikulum Orde Baru (kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994), Kurikulum Masa Reformasi (kurikulum 2004 kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kurikulum 2013). Dari semua kurikulum ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan pendidikan Indonesia dan membentuk generasi yang lebih baik.

Pendidikan tidak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan penguasa, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang penting dalam usaha membentuk kepribadian nasional serta identitas suatu bangsa. Kedudukan ini membuat mata pelajaran sejarah memegang peranan strategis dalam membentuk moralitas, nasionalisme dan watak peserta didik. Bagi pemerintah Orde Baru, hal ini malah dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk menggunakan mata pelajaran sejarah sebagai instrumen politik dengan menanamkan pandangan dan ideologinya ke dalam mata pelajaran sejarah. Hal ini amat dirasakan sekali bahwa dalam setiap perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah pada masa Orde Baru, muatan-muatan yang berbau politik pemerintah selalu mendominasi seiring dengan situasi politik yang berkembang saat itu.

DAFTAR REFERENSI

Alfian, M. (2011). Pendidikan Sejarah Dan Permasalahan Yang Dihadapi. *Khazanah Pendidikan*, 3(2), Article 2.

Alhamuddin. (2019). *Politik kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia: sejak zaman kemerdekaan hingga reformasi (1947-2013)*. Kencana.

Amalia, N., Penelitian, S., Pengembangan, D., & Djuanda, U. (2024). *PENERAPAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS*. 3, 12620–12632.

Arta, K. S. (2012). Kurikulum Dan Kontroversi Buku Teks Sejarah Dalam Ktsp. *Media Komunikasi Fpips*, 11(2), Article 2. <Https://Doi.Org/10.23887/Mkfis.V11i2.459>

Azis, R. (2019). Ilmu Pendidikan Islam(B. Baharuddin, Ed.). Sibuku. <Https://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/13856>

Djohar & Istining sih. (2017). *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Kehidupan Nyata*. Suluh Media.

Huda Rohmadi, Syamsul, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Araska, 2012

Iramdan & Lengsi Manurung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Jurnal, Vol. 5, No.2, April 2019

Irshanto, A. B. (2021). Konfrontasi Indonesia-Malaysia Persepektif Buku Teks Sejarah. Cv. Azka Pustaka.

Isma, C. N., Rohman, N., & Istining sih, I. (2022). *Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 4 Di Min 13 Nagan Raya*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 7932–7940

Mustari, M., & Rahman, M. T. (2014). Manajemen Pendidikan. Rajagrafika Persada.

Nurhalim, M. (2011). Analisis perkembangan kurikulum di Indonesia (Sebuah pengamatan desain dan pendekatan). *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16 (3), 339-356.

Nurmadiyah, Nurmadiyah.“Kurikulum Pendidikan Agama Islam.”Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban 2 (2)2018.

Ramadhani, R., Masrul, M., Nofriansyah, D., Abi Hamid, M., Sudarsana, I. K., Sahri, S., Simarmata, J., Safitri, M., & Suhelayanti, S. (2020). *Belajar Dan Pembelajaran: Konsep Dan Pengembangan*. Yayasan Kita Menulis.

Safitri, R., & Purwaningsih, S. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968- 1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644.

Safitri, R., & Purwaningsih, S. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968- 1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644.

Suryadi, A. (2022). *Life Skill Dalam Pembelajaran Sejarah*. Penerbit Lakeisha.

Wandini, R. R., Maghfirah, S., & Hasibuan, A. T. (2021). *Analisis Desain Pembelajaran Pkn Di Sd/Mi Kelas Tinggi*. *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 12(1), 59–72.